

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atas nilai dari orang, objek, kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini objek yang akan diteliti adalah komposisi DPRD, Ukuran DPRD, Struktur Kepemimpinan DPRD, Pengetahuan DPRD, *Tenure* DPRD, temuan kelemahan pengendalian intern, temuan ketidakpatuhan pada undang-undang dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten/Kota di Indonesia.

### **3.2 Metode Penelitian**

#### **3.2.1 Desain Penelitian**

Penulis menggunakan pendekatan kuantitatif yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Indriantoro & Supomo, 2014). Metode yang digunakan adalah metode eksplanatif. Metode eksplanatif merupakan metode yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan jelas (Sugiyono, 2013, hlm. 13).

#### **3.2.2 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan, Website resmi Pemerintah Daerah yang berkaitan, Website DPRD Kabupaten/Kota yang berkaitan, Badan Pusat Statistik, internet, serta sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber antara lain :

Tabel 3. 1  
Jenis dan Sumber Data

No	Data	Sumber
1	Data komposisi anggota DPRD Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2015	Buku Profil anggota DPRD dari <i>website</i> DPRD Pemerintah Daerah dan <i>Website</i> KPU
2	Data ukuran DPRD Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2015	Pusat Informasi dan Komunikasi pada <i>website</i> KPU
3	Data struktur kepemimpinan DPRD Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2015	Buku Profil anggota DPRD dari <i>website</i> DPRD Pemerintah Daerah dan <i>Website</i> KPU
4	Data latar belakang pendidikan anggota DPRD Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2015	Buku Profil anggota DPRD dari <i>website</i> DPRD Pemerintah Daerah dan <i>Website</i> KPU
5	Data pengalaman anggota DPRD Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2015	Buku Profil anggota DPRD dari <i>website</i> DPRD Pemerintah Daerah dan <i>Website</i> KPU
6	Data temuan Audit BPK (temuan kelemahan pengendalian) atas LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2014	Pusat Informasi dan Komunikasi Badan Pemeriksa Keuangan
7	Data temuan Audit BPK (temuan ketidakpatuhan pada undang-undang) atas LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2014	Pusat Informasi dan Komunikasi Badan Pemeriksa Keuangan
8	Data hasil pemeringkatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2015	Dokumen Hasil EKPPD pada <i>website</i> Kementrian Dalam Negeri

### 3.2.3 Definisi Variabel dan Operasional Variabel

#### 1.2.3.1 Definisi Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas, sedangkan variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja pemerintah daerah. Dan untuk variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Komposisi DPRD, Ukuran DPRD, Struktur Kepemimpinan, Pengetahuan, *Tenure*, Temuan Kelemahan Pengendalian Intern, dan Temuan Ketidapatuhan pada UU.

##### 1. Komposisi anggota DPRD

Komposisi DPRD adalah banyak sedikitnya jumlah anggota DPRD yang mengusung kepala daerah (Aribowo, 2008). Komposisi anggota DPRD diukur sesuai dengan penelitian Sutaryo (2013), Subiyantoro (2016), dengan rumus :

$$\text{KOMP} = \frac{\text{Jumlah anggota parpol pendukung kepala daerah}}{\text{Jumlah seluruh anggota DPRD}}$$

##### 2. Ukuran DPRD

Ukuran DPRD adalah jumlah anggota legislatif (DPRD) yang bertugas mengawasi pemerintah daerah agar pemerintah daerah tersebut dapat mengalokasikan anggaran yang ada untuk dapat digunakan dengan baik. Ukuran DPRD diukur dengan melihat jumlah keseluruhan anggota DPRD yang ada di Kabupaten/Kota tersebut.

##### 3. Struktur kepemimpinan DPRD

Struktur kepemimpinan DPRD diukur dengan melihat proporsi asal partai politik pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan jumlah keseluruhan anggota DPRD. Struktur Kepemimpinan dirumuskan sesuai dengan Dalton (1998), Prasetyo (2014) yaitu :

$$\text{SK} = \frac{\text{Jumlah Anggota parpol pendukung pimpinan DPRD}}{\text{Jumlah seluruh DPRD}}$$

#### 4. *Tenure* DPRD

*Tenure* adalah suatu kurun waktu atau lamanya tenaga kerja itu bekerja di suatu tempat. Tingkat *tenure* DPRD diukur dengan rumus :

$$\text{TNR} = \text{Rata-rata masa kerja DPRD}$$

#### 5. Pengetahuan DPRD

Pengetahuan adalah hasil interaksi dari pengindraan suatu objek, baik itu diperoleh dari indera penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, maupun perasa yang memiliki suatu kebenaran makna dan kesan tertentu dimana hasil yang diperoleh akan terbentuk suatu perilaku berdasarkan pengetahuan. Pengetahuan DPRD diukur sesuai dengan Winarna (2007), Sutaryo (2013) yaitu :

$$\text{PENG} = \frac{\text{Jumlah Anggota DPRD pendidikan diatas SMA}}{\text{Jumlah seluruh anggota DPRD}}$$

#### 6. Temuan Kelemahan Pengendalian Intern

Menurut Veriza (2015, hlm. 3) temuan kelemahan pengendalian intern merupakan kasus yang ditemukan oleh BPK terhadap laporan keuangan Pemda atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), BPK mengklasifikasikan temuan audit kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) adalah sebagai berikut :

- a. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Pelaporan
- b. Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
- c. Kelemahan Struktur Pengendalian Intern

Dalam penelitian ini, temuan kelemahan pengendalian intern dilihat dengan menggunakan *time lag*. *Time lag* adalah jeda waktu antara fenomena yang terjadi sampai dengan adanya efek yang terasa karena suatu kebijakan. Temuan kelemahan pengendalian intern diukur menggunakan jumlah temuan audit kelemahan pengendalian internal sesuai dengan penelitian

Jakawinarna (2013), Mustikarini (2012), Novianti (2015), dan Risma (2015). Rumusnya adalah sebagai berikut :

$$\text{Temuan Kelemahan Pengendalian Intern} = \frac{\text{Jumlah Kelemahan}}{\text{Pengendalian Internal}}$$

#### 7. Temuan Ketidapatuhan pada Undang-Undang

Menurut Veriza (2015, hlm. 3) temuan ketidakpatuhan pada undang-undang merupakan kasus yang ditemukan oleh BPK terhadap laporan keuangan Pemda atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan perundang-undangan.

Klasifikasi temuan audit ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a. Temuan yang menyebabkan kerugian negara/potensi kerugian negara
- b. Temuan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan
- c. Temuan Penyimpangan Administrasi
- d. Temuan Ketidakefisienan
- e. Temuan Ketidakefektifan

Dalam penelitian ini, temuan ketidakpatuhan pada UU juga dilihat dengan menggunakan *time lag*. Temuan ketidakpatuhan pada UU diukur menggunakan jumlah temuan ketidakpatuhan terhadap undang-undang sesuai dengan penelitian Jakawinarna (2013), Mustikarini (2012), Novianti (2015), dan Risma (2015). Rumusnya adalah sebagai berikut :

$$\text{Temuan Ketidapatuhan pada UU} = \frac{\text{Jumlah Ketidapatuhan}}{\text{terhadap Undang-Undang}}$$

#### 8. Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi (Mahsun, 2006, hlm. 25). Sedangkan menurut Handler *et.al* (dalam Dharma, 2016) Kinerja Pemerintah Daerah adalah hasil dari suatu aktivitas

pada area tertentu atau penjumlahan dari seluruh bidang kegiatan pemerintah daerah yang diukur baik secara absolut maupun indeks dalam kaitannya dengan hasil setara dengan periode sebelumnya atau sektor lain.

Menurut Permendagri No. 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) dilakukan dengan menilai capaian kinerja pada pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan menggunakan Indeks Komposit Kinerja (IKK). IKK merupakan satu kesatuan dalam sistem pengukuran kinerja pada SKPD, pemerintah daerah, provinsi, dan nasional yang berisi capaian kinerja yang diisi oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya dan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Tim Penilai. Terdapat 2 indikator dalam menilai IKK, yaitu :

1. Indeks Capaian Kinerja (bobot 95%)
2. Indeks Kesesuaian Materi (bobot 5%)

Metode pemberian skor dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

1. Cara penggabungan pada IKK, dengan melalui tahapan :
  - a. Tahap penggabungan IKK
  - b. Tahap normalisasi data melalui rumus
  - c. Tahap penilaian rata-rata nilai normalisasi
  - d. Tahap pemberian skor

Tanpa penggabungan IKK, dengan cara :

- a.  $> (1,25\% \times \text{rata-rata normalisasi}) = 4$
- b.  $> (\text{rata-rata normalisasi})$  sampai dengan  $1,25\%$  rata-rata normal  $=3$
- c.  $> (0,75\% \times \text{rata-rata normalisasi})$  sampai dengan rata-rata normal  $=2$
- d.  $< (0,75\% \times \text{rata-rata normalisasi}) =1$

Tingkat pemberian skor :

- a. Tingkat IKK
- b. Tingkat urusan
- c. Tingkat aspek
- d. Tingkat capaian kinerja

- e. Tingkat indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

### 3.2.3.2 Operasional Variabel

Tabel 3. 2  
Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Komposisi DPRD		Perbandingan jumlah anggota DPRD partai pendukung kepala daerah dengan jumlah keseluruhan DPRD	Rasio
Ukuran DPRD		Jumlah seluruh anggota DPRD	Rasio
Struktur Kepemimpinan DPRD		Perbandingan jumlah anggota DPRD partai politik pimpinan DPRD dengan jumlah keseluruhan DPRD	Rasio
Pengetahuan DPRD	Latar Belakang Pendidikan	Perbandingan jumlah anggota DPRD pendidikan diatas SMA dengan jumlah seluruh DPRD	Rasio
<i>Tenure</i> DPRD	<i>Tenure</i> (Masa Kerja) / Pengalaman DPRD	Perbandingan rata rata masa kerja DPRD daerah dengan jumlah rata rata masa kerja DPRD keseluruhan	Rasio
Temuan Kelemahan Pengendalian Intern	Hasil temuan audit dari BPK	- Jumlah Temuan Kelemahan SPI	Ordinal
Temuan Ketidapatuhan terhadap UU	Hasil temuan audit BPK	- Jumlah Temuan Ketidapatuhan terhadap UU	Ordinal
Kinerja Pemerintah Daerah		- Total Indeks Komposit Kinerja	Rasio

### 3.2.4 Populasi dan Sampel Penelitian

#### 3.2.4.1 Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2009). Menurut Cooper (2009) populasi adalah total kumpulan elemen atau unsur yang kita harapkan membuat simpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 416 Kabupaten dan 98 Kota.

Tabel 3. 3  
Daftar Populasi Penelitian

No	Nama Provinsi	Kabupaten	Kota	Jumlah
1	Provinsi Aceh	18	5	23
2	Provinsi Sumatera Utara	25	8	33
3	Provinsi Sumatera Barat	12	7	19
4	Provinsi Riau	10	2	12
5	Provinsi Jambi	9	2	11
6	Provinsi Sumatera Selatan	13	4	17
7	Provinsi Bengkulu	9	1	10
8	Provinsi Lampung	13	2	15
9	Provinsi Bangka Belitung	6	1	7
10	Provinsi Kepulauan Riau	5	2	7
11	Provinsi DKI Jakarta	1	5	6
12	Provinsi Jawa Barat	18	9	27
13	Provinsi Jawa Tengah	29	6	35
14	Provinsi DI Yogyakarta	4	1	5
15	Provinsi Jawa Timur	29	9	38
16	Provinsi Bali	8	1	9
17	Provinsi Banten	4	4	8
18	Provinsi Nusa Tenggara Barat	8	2	10
19	Provinsi Nusa Tenggara Timur	21	1	22
20	Provinsi Kalimantan Barat	12	2	14
21	Provinsi Kalimantan Tengah	13	1	14
22	Provinsi Kalimantan Selatan	11	2	13



23	Provinsi Kalimantan Timur	7	3	10
24	Provinsi Kalimantan Utara	4	1	5
25	Provinsi Sulawesi Utara	11	4	15
26	Provinsi Sulawesi Tengah	12	1	13
27	Provinsi Sulawesi Selatan	21	3	24
28	Provinsi Sulawesi Tenggara	15	2	17
29	Provinsi Gorontalo	5	1	6
30	Provinsi Sulawesi Barat	6	0	6
31	Provinsi Maluku	9	2	11
32	Provinsi Maluku Utara	8	2	10
33	Provinsi Papua	28	1	29
34	Provinsi Papua Barat	12	1	13
	JUMLAH	416	98	514

Sumber : kemendagri.go.id, 2017

#### 3.2.4.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian dari populasi atau sejumlah anggota yang dipilih dari populasi (Sekaran, 2009). Kriteria pengambilan sampel penelitian ini menggunakan *non-probability sampling* yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* menurut Sugiyono (2014) adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif. Ketentuan dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih memiliki semua data Profil Anggota DPRD secara lengkap meliputi komposisi DPRD, ukuran DPRD, Struktur Kepemimpinan DPRD, Latar Belakang Pendidikan, *Tenure* anggota DPRD, temuan audit, dan data Skor Kinerja Pemerintah Daerah tahun 2015. Sampel yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini berjumlah 220 Kabupaten/Kota.

Tabel 3. 4  
Pemilihan Sampel Penelitian

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Pemerintah daerah di Indonesia Tahun 2015	514
Pemerintah daerah yang tidak mempunyai data lengkap skor kinerja, temuan audit, dan data DPRD	(293)
<b>Jumlah Sampel Penelitian</b>	220

*Sumber : data sekunder diolah*

### **3.2.5 Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk tulisan angka, gambar, buku, catatan dan arsip yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung suatu penelitian (Sugiyono, 2015, hlm. 329).

### **3.2.6 Teknik Analisis Data**

#### **3.2.6.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Uji Statistik deskriptif merupakan metode untuk menguraikan karakteristik dan sifat dari suatu keadaan dan membuat deskripsi mengenai fakta dan sifat dari fenomena yang terjadi secara sistematis dan akurat. Statistik deskriptif adalah bagian statistika tentang pengumpulan data, penyajian, penentuan nilai-nilai statistika, pembuatan diagram/gambar mengenai sesuatu hal agar data yang disajikan lebih mudah dipahami (Nasution, 2017). Untuk menguji hipotesis deskriptif, jenis teknik statistika yang digunakan harus sesuai dengan jenis data/variabel berdasarkan skala pengukurannya yaitu nominal, ordinal, interval, atau rasio.

Pada penelitian ini, pengujian statistik deskriptif dilihat dari rata-rata (*mean*), standar deviasi (*standard deviation*), dan maksimum-minimum. *Mean* adalah nilai rata-rata dari sekelompok data, *standar deviation* adalah ukuran sebaran statistik, dan maksimum minimum adalah nilai terbesar dan nilai terkecil dari sekelompok data.

#### **3.2.6.2 Metode Successive Interval (MSI)**

Metode Successive Interval adalah proses mengubah data ordinal menjadi data interval (Sarwono, 2018). Dalam penelitian ini, variabel temuan kelemahan dan temuan ketidakpatuhan pada Undang-Undang memiliki data ordinal. Maka dari itu, data ordinal tersebut harus dirubah ke dalam data interval agar memenuhi syarat melakukan uji regresi linier berganda. Dalam proses pengolahan data MSI tersebut, peneliti menggunakan *Additional Instrument* (Add-Ins) stats97.xla dari Microsoft Excel 2010.

### 3.2.6.3 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi adalah analisis yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, dan analisis ini dapat menunjukkan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2013, hlm. 96). Analisis regresi linier berganda adalah hubungan dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen secara linear untuk memprediksi suatu nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen (Prayitno, 2010). Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh suatu variabel bebas atau independen berpengaruh terhadap variabel terikat atau dependen (Sunyoto, 2013, hlm. 133)

Persamaannya :

$$\hat{Y} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + e$$

Keterangan :

$\hat{Y}$  = Variabel Dependen (Kinerja Pemerintah Daerah)

$\beta_0$  = konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6, \beta_7$  = koefisien regresi (peningkatan/penurunan variabel Y yang didasarkan pada variabel  $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7$ )

$X_1$  = variabel independen 1 (Komposisi DPRD)

$X_2$  = variabel independen 2 (Struktur Kepemimpinan DPRD)

$X_3$  = variabel independen 3 (Pengetahuan DPRD)

$X_4$  = variabel independen 4 (Ukuran DPRD)

$X_5$  = variabel independen 5 (Pengalaman DPRD)

$X_6$  = variabel independen 6 (Temuan Kelemahan Pengendalian Intern)

$X_7$  = variabel independen 7 (Temuan Ketidapatuhan pada UU)

Model regresi akan menghasilkan penduga yang tidak bias apabila memenuhi syarat asumsi klasik diantaranya :

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel dependen dan variabel independen berdistribusi normal dalam model regresi. Untuk menguji normalitas data, dapat menggunakan uji *kolmogorov-smirnov*. Uji *Kolmogorov-Smirnov* adalah sebuah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku (Nugroho,

2016). Uji *Kolmogorov-Smirnov* digunakan karena merupakan uji yang sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi para peneliti.

Ketentuan untuk uji normalitas ini adalah :

- a. Berdistribusi normal jika *p value*  $>0,05$  atau bila nilai signifikan lebih dari nilai *alpha*  $0,05$  maka model ini layak digunakan dalam penelitian
- b. Tidak berdistribusi normal jika *p value*  $<0,05$  atau bila nilai signifikan kurang dari nilai *alpha*  $0,05$  maka model ini tidak layak digunakan dalam penelitian

## 2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah model dalam regresi pada penelitian ini terdapat korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2013, hlm. 105). Apabila terdapat multikolinearitas dalam model regresi penelitian ini maka akan dapat mengakibatkan ketidakpastian estimasi. Hal ini membuat koefien regresi menjadi tidak signifikan dan standar deviasi menjadi sangat sensitif terhadap perubahan data. Multikolinearitas dapat dilihat dari *Tolerance* dan *Variance Inflation Factors (VIF)* dengan alat bantu *Statistic Product and Service Solution (SPSS)* dengan ketentuan variabel independen yang terpilih adalah variabel yang mempunyai *tolerance* tidak kurang dari  $0,5$  atau sama dengan nilai  $VIF <10$

## 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi penelitian ini terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Salah satu pengujiannya dengan melihat *variance* dan residualnya. Apabila *variance* dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Apabila *variance* dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain berubah, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang homoskedastisitas, dan tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 3.2.7 Pengujian Hipotesis

#### 3.2.7.1 Uji t-Statistik

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan dalam uji t dapat menggunakan dua cara yakni berdasarkan perbandingan antara  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$  atau berdasarkan perbandingan nilai signifikansi. Rumus yang digunakan untuk uji t adalah sebagai berikut :

$$t = \frac{b_i}{S_{b_i}}$$

Sumber : (Sugiyono, 2013)

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan cara pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan antara  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$  dengan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Merumuskan hipotesis
  - a.  $H_0 : \beta = 0$  maka Komposisi DPRD tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah  
 $H_a : \beta \neq 0$  maka Komposisi DPRD berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
  - b.  $H_0 : \beta = 0$  maka Ukuran DPRD tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah  
 $H_a : \beta \neq 0$  maka Ukuran DPRD berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
  - c.  $H_0 : \beta = 0$  maka Struktur Kepemimpinan DPRD tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah  
 $H_a : \beta \neq 0$  maka Struktur Kepemimpinan DPRD berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
  - d.  $H_0 : \beta = 0$  maka Pengetahuan DPRD tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah  
 $H_a : \beta \neq 0$  maka Pengetahuan DPRD berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

- e.  $H_0 : \beta = 0$  maka *Tenure* DPRD tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah  
 $H_a : \beta \neq 0$  maka *Tenure* DPRD berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
  - f.  $H_0 : \beta = 0$  maka temuan Kelemahan pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah  
 $H_a : \beta \neq 0$  maka temuan Kelemahan pengendalian intern berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
  - g.  $H_0 : \beta = 0$  maka temuan Ketidapatuhan pada UU tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah  
 $H_a : \beta \neq 0$  maka temuan Ketidapatuhan pada UU berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
2. Kriteria pengujian
- a. Jika  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$  atau nilai signifikansi  $>0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak
  - b. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau nilai signifikansi  $<0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima

### 3.2.7.2 Uji F-statistik ( Uji Signifikansi Simultan)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen (Komposisi DPRD, Ukuran DPRD, Struktur Kepemimpinan DPRD, Pengetahuan DPRD, *Tenure* DPRD dan Temuan Kelemahan Pengendalian Intern, Temuan Ketidapatuhan pada Undang-Undang) yang digunakan secara bersama-sama mempengaruhi variabel independen (Kinerja Pemerintah Daerah). Pengujian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Merumuskan hipotesis
  - a.  $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = \beta_6 = \beta_7 = 0$  maka Komposisi DPRD, Ukuran DPRD, Struktur Kepemimpinan DPRD, Pengetahuan DPRD, *Tenure* DPRD, Temuan Kelemahan Pengendalian Intern dan Temuan Keidapatuhan pada UU tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

- b.  $H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq \beta_5 \neq \beta_6 \neq \beta_7 \neq 0$  maka setidaknya terdapat 1  $\beta$  tidak sama dengan nol berarti setidaknya terdapat 1 variabel yang berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah

## 2. Kriteria Pengujian

Menurut Ghozali (2013) ketentuan penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut :

- a. Apabila  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$  atau nilai signifikansi  $>0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau nilai signifikansi  $<0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

### 3.2.8 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Pengujian ini dilakukan untuk memprediksi seberapa besar kontribusi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini bisa dilakukan dengan syarat hasil uji F dalam analisis regresi bernilai signifikan. Apabila hasil uji F tidak signifikan maka pengujian ini tidak bisa dilakukan. Untuk melihat hasil uji *R square* dalam SPSS, bisa dilihat dari tabel output summary pada kolom *R square*. Ketentuannya adalah :

- a. Semakin kecil nilai *R square* (mendekati 0) maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin lemah
- b. Semakin besar nilai *R square* (mendekati 1) maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin kuat